

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2025**

Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/ DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik
							(Rp)	%				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100		44.218.526.500	26.151.619.122	59,14%		APBD	Sumatera Selatan	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Laporan	6		100.000.000	30.789.100	30,79%		APBD	Sumatera Selatan	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan	2		50.000.000	0	0,00%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	5	50.000.000	30.789.100	61,58%	83,33%	APBD	Sumatera Selatan	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	Persen	100		29.706.178.800	20.733.097.976	69,79%		APBD	Sumatera Selatan	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	1554	1045	28.827.174.000	20.112.156.776	69,77%	67,25%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga honorer administrasi yang dibayar	Dokumen	12	9	413.284.800	295.383.000	71,47%	75,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah tenaga penatausahaan dan verifikator yang dibayar	Dokumen	12	9	385.720.000	282.180.000	73,16%	75,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	80.000.000	43.378.200	54,22%	100,00%	APBD	Sumatera Selatan	
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang dipelihara	Persen	100		20.000.000	7.500.000	37,50%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	Laporan	12	6	20.000.000	7.500.000	37,50%	50,00%	APBD	Sumatera Selatan	
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	Persen	100		2.903.674.300	1.277.744.318	44,00%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya	Orang	143		300.000.000	0	0,00%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	80	55	2.137.130.300	1.084.204.325	50,73%	68,75%	APBD	Sumatera Selatan	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	45	25	466.544.000	193.539.993	41,48%	55,56%	APBD	Sumatera Selatan	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/ DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik
							(Rp)	%				
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang tercapai	Persen	100		2.417.510.000	1.508.911.537	62,42%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	3	120.000.000	119.613.021	99,68%	100,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	4	220.000.000	219.611.900	99,82%	100,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	3	150.000.000	149.555.290	99,70%	100,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	4	220.000.000	186.846.010	84,93%	100,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	30	20	35.000.000	21.508.000	61,45%	66,67%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	96	58	1.522.510.000	804.577.316	52,85%	60,42%	APBD	Sumatera Selatan	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	2		150.000.000	7.200.000	4,80%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100		3.215.911.000	1.625.962.200	50,56%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan yang disediakan	Unit	1	1	360.000.000	358.875.000	99,69%	100,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	3		1.579.911.000	0	0,00%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	11	11	1.276.000.000	1.267.087.200	99,30%	100,00%	APBD	Sumatera Selatan	
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	Persen	100		1.207.980.000	669.825.566	55,45%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5	14.520.000	3.932.500	27,08%	41,67%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	8	598.960.000	287.693.078	48,03%	66,67%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	8	594.500.000	378.199.988	63,62%	66,67%	APBD	Sumatera Selatan	
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Persen	100		4.647.272.400	297.788.425	6,41%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	20	12	477.272.400	200.019.625	41,91%	60,00%	APBD	Sumatera Selatan	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/ DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik
							(Rp)	%				
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3		70.000.000		0,00%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50		150.000.000		0,00%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	3.950.000.000	97.768.800	2,48%	100,00%	APBD	Sumatera Selatan	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah	Persen	100		6.336.229.800	2.231.620.266	35,22%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
IX	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Persen	100		4.198.960.800	1.371.335.823	32,66%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	100	50	892.421.000	278.410.696	31,20%	50,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	100	50	1.273.838.000	345.956.280	27,16%	50,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	2	1	200.378.000	58.361.327	29,13%	50,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Reviu Laporan Keuangan	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	1	1	230.670.000	125.542.870	54,43%	100,00%			
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	45	25	1.179.878.800	368.122.720	31,20%	55,56%	APBD	Sumatera Selatan	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	6	3	421.775.000	194.941.930	46,22%	50,00%	APBD	Sumatera Selatan	
X	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	100		2.137.269.000	860.284.443	40,25%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/ daerah yang ditangani	Laporan	22		35.000.000		0,00%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan hasil pengawasan daengan tujuan tertentu	Laporan	135	80	2.102.269.000	860.284.443	40,92%	59,26%	APBD	Sumatera Selatan	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/ DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik
							(Rp)	%				
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persen	100		1.946.549.000	757.937.995	38,94%	0,00%	APBD	Sumatera Selatan	
XI	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Persen	100		265.244.000	67.748.750	25,54%		APBD	Sumatera Selatan	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan	Rekomendasi	3	1	265.244.000	67.748.750	25,54%	33,33%	APBD	Sumatera Selatan	
XII	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Persen	100		1.681.305.000	690.189.245	41,05%		APBD	Sumatera Selatan	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Perangkat Daerah	39	30	590.341.500	258.017.240	43,71%	76,92%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi, verifikasi dan penilaian birokrasi	Perangkat Daerah	41	30	558.261.500	285.484.785	51,14%	73,17%	APBD	Sumatera Selatan	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4	2	208.578.000	74.592.720	35,76%	50,00%	APBD	Sumatera Selatan	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat Daerah	4	2	324.124.000	72.094.500	22,24%	50,00%	APBD	Sumatera Selatan	
						52.501.305.300	29.141.177.383	55,51%				

Palembang, September 2025

Inspektur,



Dr. H. Kurniawan, AP., M. Si., CGCAE

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19750617 1995011 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telpon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprosumsel@yahoo.com, Website : www.itprov-sumsel.com

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN"

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2025 :

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Meningkatkan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah yang Baik
- 3) Terwujudnya Penegakan Integritas
- 4) Meningkatkan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN

1) Belanja Perangkat Daerah

Total Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 52,501,305,300,00, yang terdiri atas :

- Belanja operasional : Rp45.695.394.300,00

Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp29.109.354.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp16.586.040.300,00

- Belanja Modal : Rp6.805.911.000,00

Yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp2.855.911.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp3.950.000.000,00

2) Program dan Anggaran APBD

No	Program	APBD
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 44,218,526,500
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 6,336,229,800
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1,946,549,000

3) Program dan Anggaran APBN

Sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka dilakukan Efisiensi terhadap kegiatan yang bersumber dari dana APBN termasuk Dana Dekonsentrasi.

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

1) Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra)

- Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP kategori A
- Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai SAKIP kategori B ke atas
- Indeks Integritas Daerah
- Jumlah perangkat daerah yang diusulkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM
- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti
- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
- Level Maturitas SPIP
- Level Kapabilitas APIP

2) Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

- Nilai Maturitas SPIP
- Indeks Integritas Daerah

5. Kegiatan Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di dalam dan luar provinsi. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Wilayah kegiatan terbatas pada internal Inspektorat Daerah, sedangkan pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi lokasi kegiatan mencakup 41 Organisasi Perangkat Daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

1. Maksud

Penyusunan laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan diharapkan untuk memberikan laporan capaian program dan kegiatan serta realisasi pertriwulan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai bahan evaluasi dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan ini pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

a) Perbandingan antara Realisasi (Keuangan dan fisik) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN :

Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d.Triwulan ini	Realisasi s.d.Triwulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d.Triwulan ini
1	2	3	4	5	6	7
Total Belanja	52,501,305,300	29,141,177,383	75	55,51	75	73,46
-Belanja Operasi	45.695.394.300	27,776,321,383	75	60,79	75	81,26
- Belanja Modal	6.805.911.000	1,364,856,000	75	20,05	75	29,02

b) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat daerah tahun 2024 sbb :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Maturitas SPIP	skor	3,12	3,041	97,46%
2	Indeks Integritas Daerah	indeks	65,7	60,63	92,28%
3	Persentase tindak lanjut temuan APIP	%	78,5	74,05	94,33%
4	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	91,8	76,0	82,78%
5	Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	Unit Perangkat Daerah	1 Unit	-	-
6	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	84	-	-

Renstra Perangkat Daerah yang tidak termasuk dalam Perubahan RPJMD
Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Kategori A	%	50%	-	-
2	Persentase Kabupaten/Kota dengan Nilai SAKIP kategori B ke atas	%	37%	-	-
3	Level Kapabilitas APIP	Level	3	-	-

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a) Kendala

1. Indikator yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya kinerja Inspektorat saja tetapi dipengaruhi juga oleh kinerja dari pihak lain / OPD terkait dan dinilai oleh eksternal, sehingga dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik disamping kompetensi dan kecakapan.
2. Penilaian Indikator Kinerja sampai dengan Triwulan ke-III belum bisa diperoleh dikarenakan sebagian besar realisasi dari Indikator Kinerja didapat dari pihak eksternal yang akan dirilis pada triwulan IV atau pada Tahun berikutnya.
3. Adanya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan menyesuaikan Tujuan di dalam Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025.

b) Tindak Lanjut yang diperlukan

Untuk ke depannya akan dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi ke perangkat daerah dan pihak eksternal terkait lainnya baik terhadap pihak yang dilakukan pembinaan maupun pihak yang melakukan penilaian terhadap capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan dan APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dapat menjadi bahan evaluasi per triwulan, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025
Inspektur,

Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617 1995011 001

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (IKU DAN IKD)
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Inspektorat

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan External	%	91,9	76	82,70%	Penilaian berdasarkan LHP tahun 2005 s.d sekarang, sehingga banyak temuan/rekomendasi pada tahun lampau yang tidak dapat diselesaikan sehingga perlu dibangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal	%	78,6	79,13	100,67%	Komunikasi yang baik antara Inspektorat Provinsi dan OPD terkait merupakan faktor pendorong.
2	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern yang Baik	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,13	-	-	Nilai akan di rilis oleh BPKP pada Triwulan IV Tahun 2025
		Kapabilitas APIP	Level	Level 3	-	-	Nilai akan di rilis oleh BPKP pada Triwulan IV Tahun 2025
3	Terwujudnya Penegakan Integritas	Jumlah Unit kerja yang diusulkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Unit	1	1	100,00%	Menunggu persetujuan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Wilayah Bebas dari Korupsi
4	Meningkatnya Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan	Indeks Integritas Daerah	Nilai	65,80	60,63	92,14%	1. Praktik nepotisme dalam rekrutmen dan promosi pegawai menyebabkan penurunan kinerja organisasi dan merusak budaya integritas 2. Penyelewengan dana publik seringkali terkait dengan keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu 3. Penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi
		Nilai MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) KPK RI	%	84	46	54,76%	Nilai final akan di rilis di Triwulan IV 2025


 Inspektur
 Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
 NIP. 19750617 1995011001